

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mesir adalah sebuah negara sosial demokrasi yang berbentuk republik. Mesir dikepalai oleh seorang presiden. Mesir menjadi negara Republik sejak 18 Juni 1953. Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dan memiliki iklim yang panas. Jika kita melihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir adalah negara bagian dari Asia Barat (K Hitti, 2001). Kebudayaan Mesir sebagian besar adalah kebudayaan Islam bahkan menjadi pernghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab. Mesir dikelilingi oleh gurun pasir tandus sehingga hanya sebagian kecil wilayah Mesir yang bisa digunakan untuk pertanian. Di Mesir terdapat Sungai Nil yang menjadi salah satu kekayaan Mesir dimana Sungai Nil juga merupakan pendukung kebudayaan Mesir sejak masa silam (Harris, 1988).

Sejak 14 Oktober 1981, Mesir dipimpin oleh Muhammad Husni Mubarak setelah pembunuhan terhadap Presiden Muhammad Anwar Sadat. Husni Mubarak memimpin Mesir selama 5 (lima) periode. Pada awal pemerintahannya, selama 6 (enam) tahun Husni Mubarak masih menerapkan beberapa kebijakan-kebijakan Sadat (BBC News, 2012). Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semi-presidensial multipartai dimana kekuasaan eksekutif dibagi kepada presiden dan perdana menteri. Akan tetapi, pada eksekusinya, kekuasaan semua menjadi terpusat di presiden. Presiden selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Dibawah pemerintahan Husni, Mesir mengadakan pemilu parlemen multi-partai.

Husni Mubarak sempat menubah pemilihan presiden menjadi pemilu yang multi-kandidat pada awal 2005. Hal ini berarti sejak tahun 1952, wakyat Mesir mendapatkan kesempatan untuk bisa mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Akan tetapi, pada praktiknya banyak aturan yang menyebabkan beberapa tokoh tidak dapat bersaing dan akhirnya Husni Mubarak lah yang menjadi pemenang dalam pemilu.

Pada 26 Januari 2011, terjadi revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Husni Mubarak yang dilakukan oleh para pemuda Mesir. Ini dikarenakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Husni Mubarak tidak dapat mensejahterakan rakyatnya sendiri. Husni Mubarak adalah seorang presiden yang berkuasa paling lama yaitu selama 30 tahun (1981-2011). Revolusi tersebut berawal dari diskusi yang hanya dilakukan di media sosial sepeti Facebook dan Twitter hingga berlanjut menjadi demonstrasi besar-besaran dari berbagai kalangan masyarakat. Revolusi ini berujung pada pengunduran diri oleh Husni Mubarak pada 11 Februari 2011 (Firman, Tirto ID, 2017).

Revolusi tersebut adalah dampak dari keterlibatan Mesir dalam Arab Springs. Arab Springs atau Musim Semi Arab adalah sebuah harapan untuk hidup lebih baik dengan sistem demokratis (Sahide, 2015). Rakyat Arab menyebut peristiwa politik ini dengan sebutan *al-Tsaurat al-Arabiyyah* yang artinya adalah revolusi mengubah tananan menuju masyarakat dan bangsa ideal setelah sekian lama menjadi otoriter, dengan kekuasaan yang tidak terbatas, membatasi kebebasan masyarakat dan adanya kesenjangan antara elite dan rakyat. Orang-orang Barat

menyebut *Arab Spring* adalah sebuah titik awal untuk tumbuhnya demokrasi di negara-negara Arab (Burdah, 2014).

Tumbangya Husni Mubarak menjadi efek domino dari tumbangya rezim Ben Ali yang ada di Tunisia. Rakyat Mesir melakukan demonstrasi dengan turun ke jalanan untuk menuntut pengunduran diri Presiden Husni Mubarak yang otoriter, korup dan tidak bisa membangun Mesir selama 30 tahun menjabat sebagai Presiden. Lama jabatan Husni Mubarak dinilai sudah terlalu lama dan rakyat Mesir menginginkan adanya pemimpin baru. Apalagi, kemiskinan dan pengangguran yang sangat besar membuat dukungan rakyat kepada Husni Mubarak turun drastis. Sebanyak kurang lebih 50 persen dari 81 juta rakyat Mesir hidup di bawah garis Kemiskinan (Kompas, 2011). Memburuknya ekonomi di Mesir menjadi hal yang menakutkan bagi Mubarak (Safaat, 2011)

Sebuah stasiun televisi terkenal di Mesir yaitu Al-Jazeera membuat sebuah *polling* yang diikuti sebanyak 46.942 orang responden. Pada *polling* ini menghasilkan 90,7 persen menolak Husni Mubarak untuk memperpanjang masa jabatannya (Abdurahman, 2014). Hal ini memberikan kesimpulan jika mayoritas masyarakat Mesir menginginkan Husni Mubarak berhenti dari kursi presiden.

Setelah turunnya Husni Mubarak, Mesir melakukan pemilihan presiden. Pada 2012, Mursi mencalonkan diri sebagai calon presiden dan pada 24 juni 2012. Mursi selaku ketua, dicalonkan dari partai milik Ikhwanul Muslimin (*Muslim Brotherhood*) ini yaitu partai yang memiliki nama *Hizb al Hurayya wa al adala* atau *The Freedom and Justice Party* (FJP). Partai ini mulai muncul setelah rezim

Mubarak (Zahid, 2012). Sebelumnya, Ikhwanul Muslimin ini dilarang untuk mencalonkan kandidat presiden saat Husni Mubarak menjabat. Mursi diumumkan menjadi pemenang pemilu dengan jumlah total suara yang diperoleh sebanyak 51,73 persen mengalahkan Ahmad Syafiq yang mendapat suara 48,3 persen (Fox News, 2015).

Terpilihnya Mursi menjadi sebuah harapan baru bagi Mesir untuk menuju negara yang demokratis. Ini dikarenakan pemilu tersebut berjalan dengan aman dan bersih seperti apa yang diharapkan oleh rakyat Mesir. Pilpres ini juga dinilai sebagai pilpres paling demokratis sepanjang sejarah Mesir modern sejak negara Mesir berubah menjadi Republik dalam Revolusi 1952. Pada masa kampanye, Mursi menerukan “Islam adalah Solusi” dimana slogan ini sempat diduga jika Mursi akan menerapkan sistem teokrasi Islam fundamentalis. Akan tetapi hal itu dibantah dan ia mengatakan jika ingin mendapatkan cabang di pemerintahan yang bisa mewakili keinginan rakyat Mesir dan ingin membela kepentingan publik. Mursi menyatakan jika tidak ada demokrasi Islam melainkan hanya ada demokrasi dimana rakyat menjadi sumber kekuasaan. Dalam kampanye Mursi juga mengatakan jika ingin menegakkan hak-hak perempuan dan menempatkannya sejajar dengan hak-hak laki-laki (Hidriyah, 2012).

Selanjutnya, Mursi berjanji kepada rakyat Mesir untuk menjadi seorang presiden yang adil. Ia menjanjikan agenda Islamis moderat supaya bisa mengajak Mesir ke era demokrasi yang baru sehingga pemerintah yang otokrasi digantikan oleh pemerintahan yang terbuka atau transparan dan menghormati HAM (hak asasi manusia). Tidak hanya itu, Mursi menjanjikan jika ia ingin Mesir kembali ke

kejayaan yang sudah lama turun. Ia ingin membawa Mesir menuju “kebangkitan kembali Mesir dengan landasan Islam” (CNN Indonesia, 2019). Akan tetapi, demokratisasi yang didambakan oleh rakyat Mesir tidak seperti harapan. Mursi dikenal dengan cara memerintahnya yang otoriter. Misalnya, ia mengasingkan jutaan orang yang menuduhnya berupaya dalam memperluas kekuasaan secara sewenang-wenang. Ia juga memaksakan nilai-nilai Islam dari Ikhwanul Muslimin dan salah dalam mengolah perekonomian di Mesir.

Pada 12 Agustus 2012, ia memecat menteri pertahanan yang juga merupakan panglima militer Hussein Tantawi. Mursi juga menghapus undang-undang yang memberi kewenangan luas bagi militer di pemerintahan. Selain itu, ia mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh legislatif dengan menunjuk sendiri wakil presidennya yaitu, Mahmud Mekki (CNN Indonesia, 2019).

Terjadilah penentangan publik terhadap Mursi yang dimulai pada November 2012 disaat Mursi mengeluarkan dekrit yang memberinya sebuah kewenangan untuk memastikan jika parlemen didominasi oleh kaum Islamis sehingga bisa menyelesaikan draf konstitusi baru. Ditengah-tengah kekacauan, Mursi mengeluarkan sebuah pemberian kewenangan kepada militer guna melindungi lembaga-lembaga nasional dan TPS (tempat pemungutan suara) sampai Desember 2012 saat referendum draf konstitusi digelar.

Setelah itu, ada pemberlakuan hukum darurat dan bentrokan antara pendukung Mursi dan oposisinya tidak bisa lagi dibendung hingga menyebabkan 50 orang tewas. Militer mengultimatum Mursi akan mengintervensi jika ia tidak

mengikuti keinginan publik dalam waktu 2x24 jam. Pada tanggal 3 Juli malam, militer menanggukkan konstitusi dan memberikan pengumuman pembentukan pemerintahan sementara yang isinya adalah orang-orang teknokrat guna peralihan sebelum pilpres digelar. Penangkapan Mursi diperintahkan oleh kepala angkatan bersenjata yaitu Abdul Fattah al-Sisi (Rizqa, 2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, membentuk rumusan masalah yaitu **“Mengapa pemerintahan Mursi gagal dalam mengubah Mesir menjadi negara demokratis?”**

C. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis akan menggunakan Teori Demokrasi dan Konsep Intervensi guna membantu dalam menganalisa permasalahan yang terjadi.

1. Teori Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi merupakan bahasa Yunani yang mana *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Maka, *demos-kratos* atau demokrasi diartikan sistem yang berlaku di sebuah negara yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kedaulatan rakyat (Kencana Syafie, 2010).

Adapun artian demokrasi menurut para ahli:

a. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Sadi, 2020). Dapat disimpulkan jika sebuah kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi berada pada rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan, dan suara yang sama untuk bisa mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan terbanyak.

b. Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan dimana semua keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan dari kesepakatan mayoritas rakyatnya (Baume, 2013).

c. H. Harris Soche

Demokrasi adalah sistem pemerintahan rakyat karena itu kekuasaan pemerintah melekat didalam rakyat/ orang banyak dan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk bisa mempertahankan dan mengatur juga melindungi dari sebuah paksaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah (Soche, 1985).

d. Ranny

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang ditata dan diorganisasikan berdasar prinsip kedaulatan rakyat, kesamaan politik, konsultasi atau dialog dengan rakyat dan berdasarkan sebuah aturan yang mayoritas (Thoha, 2014).

Prinsip dasar sebuah demokrasi adalah perlindungan hak-hak individu dan minoritas didalam negara. Proses demokrasi sebuah negara dinilai tidak baik

ketika negara tidak memberikan dan membuka ruang juga peluang kepada masyarakatnya untuk berpartisipasi. Pemerintah sudah seharusnya untuk memberikan sebuah kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi ketika ada pembuatan keputusan politik (Almond & Verba, 1984). Sehingga, sebuah negara dinilai gagal melakukan demokrasi di negaranya jika hak-hak rakyatnya tidak terpenuhi dengan baik (Raharjo, 2001).

Transisi dari negara otoriter menjadi negara demokrasi di Mesir ditujukan dengan adanya pemilu yang terjadi pada tahun 2012. Hal ini karena adanya gelombang *Arab Spring* dari Tunisia yang ditujukan untuk menjatuhkan rezim otoriter menjadi demokrasi. Berdasarkan hal tersebut, demokrasi yang ada di Mesir dapat dibuktikan dengan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi.

Ketika Mesir sedang menjalankan demokratisasi di negaranya, proses yang dijalankan tidak sesuai dengan indikator demokrasi. Hal ini dibuktikan ketika Mursi mengasingkan jutaan orang dan juga memaksakan nilai-nilai Islam dari Ikhwanul Muslimin serta salah dalam mengolah perekonomian di Mesir. Mursi juga memecat menteri pertahanan yang juga merupakan panglima militer Hussein Tantawi, menghapus undang-undang yang memberi kewenangan luas bagi militer di pemerintahan, mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh legislatif dengan menunjuk sendiri wakil presidennya yaitu, Mahmud Mekki. Perjalanan Mesir untuk menuju negara demokrasi gagal ditunjukkan juga dengan hak rakyat dalam mengambil keputusan diambil alih oleh pemerintah secara otoriter.

Demokrasi sebuah negara dapat terjadi karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Mirajiah, 2013). Jika demokratisasi sebuah negara dapat disebabkan karena dua faktor tersebut, maka kegagalan demokratisasi juga dapat disebabkan karena dua faktor tersebut pula. Selain dari faktor internal, faktor intervensi pihak asing bisa menjadi salah satu faktornya (Anderson, 2001). Maka dari itu, penulis akan menggunakan konsep intervensi untuk menunjukkan faktor eksternal yang menyebabkan adanya kegagalan demokratisasi di Mesir.

2. Konsep Intervensi

Intervensi menurut J.G Starke adalah bentuk sebuah propaganda yang dilakukan oleh sebuah negara yang bertujuan untuk mengadakan sebuah revolusi atau peperangan di negara lain. Sementara intervensi menurut Black's Law Dictionary adalah campur tangan suatu negara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam urusan internal negara lain ataupun dalam pernyataan yang timbul antara negara lain (Nurislamia, 2019).

Seorang Kalevi J. Holsti menyebutkan intervensi memiliki 6 (enam) bentuk, yaitu:

a. Intervensi Diplomatik

Intervensi ini berbentuk ketika seorang diplomat campur tangan atas sebuah permasalahan politik yang sedang melanda di negara tempat ia ditugaskan.

b. Intervensi Klasik

Sebuah campur tangan yaitu melakukan sebuah misi rahasia dengan contoh penyadapan informasi kepada suatu negara untuk sebuah tujuan tertentu.

c. Pameran Kekuatan Militer

Bentuk ini terbilang efisien karena biayanya relatif murah dan risiko yang rendah dibandingkan pengiriman ekspedisi militer yang sesungguhnya ke suatu tempat.

d. Subversi

Kata lain dari subversi adalah gerakan bawah tanah. Gerakan ini yaitu sebuah gerakan politik dan militer yang ditunjang, diorganisir serta diarahkan oleh negara asing dengan maksud dan tujuan memanfaatkan suatu hal di negara sasaran.

e. Gerilya

Campur tangan ini adalah gabungan dari subversi dan sistem perang yang konvensional. Campur tangan ini tidak melulu adalah hasil intervensi dari kekuatan asing bahkan pun sebuah manifestasi dari intervensi.

f. Intervensi Militer

Bentuk campur tangan yang diwujudkan dengan cara mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang suatu pemerintahan yang sedang berkuasa ataupun membantu kelompok pemberontak (Kusumohamidjo, 1987).

Intervensi internasional di dunia sudah mengambil dari banyak bentuk mulai dari militer, ekonomi bahkan politik. Intervensi internasional mengacu kepada intervensi terhadap suatu kondisi pada masyarakat lintas batas negara (Khaled, 2012).

Dalam kudeta militer yang memiliki tujuan untuk penggulingan Mursi, Amerika Serikat (AS) diduga memberikan bantuan kepada militer Mesir dikarenakan AS enggan membantu penegakan demokrasi di Mesir karena pihak yang memenangkannya memiliki hubungan erat dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin sendiri merupakan sebuah organisasi Islam dan Politik Transnasional yang mempunyai kesempatan untuk membentuk menjadi partai politiknya sendiri Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) pasca rezim Mubarak (Firman, Tirto ID, 2019).

Selain itu AS juga diduga mendanai oposisi Mursi untuk menggulingkannya dari kursi presiden. Hal ini diduga saat adanya peninjauan dokumen pemerintah federal AS dimana memperlihatkan Washington secara diam-diam mendanai tokoh oposisi senior Mesir yang ingin menggulingkan Mursi. AS menyalurkan dana melalui programnya dalam mempromosikan demokrasi di kawasan Timur Tengah Departemen Luar Negeri AS. Dana ini disebut sebagai sebuah 'Bantuan Demokrasi'. Akan tetapi, pendanaan ini adalah untuk aktivis anti Mursi yang diantaranya adalah perwira polisi Mesir yang merencanakan penggulingan Mursi, seorang politisi yang anti-Islam yang menganjurkan untuk menutup masjid dan menyeret pengkutbah dengan kekuatan militer dan juga kalangan

oposisi politis yang mendorong untuk penggulingan pemimpin pertama yang terpilih secara demokratis di Mesir (Kiblat, 2013).

D. Hipotesa

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah serta kerangka pemikiran dapat diambil sebuah hipotesa, sebagai berikut:

1. Mesir gagal mengubah negaranya menjadi demokratis dikarenakan faktor internal,
2. Kegagalan Mesir dalam menciptakan demokrasi di negaranya didukung oleh Amerika Serikat dengan memberikan intervensi pendanaan kepada oposisi Mursi untuk melakukan kudeta militer terhadap Mursi.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kegagalan demokratisasi Mesir di era Mursi,
2. Mengetahui peran Amerika Serikat dalam intervensinya terhadap kegagalan demokratisasi di Mesir.

F. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

1. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang bersifat sekunder, yaitu data diperoleh dari sumber lain atau secara tidak langsung.

Data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh dari tesis, skripsi, jurnal,

buku, berita, bukti, catatan atau laporan historis yang terkumpul dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak.

2. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dikelola, diorganisasikan dan dipilih kemudian memutuskan hasilnya. Bersifat deskriptif karena akan menjelaskan penyebab-penyebab yang menjadi dampak terjadinya suatu peristiwa.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini memiliki jangkauan pada tahun 2012-2013 yaitu pada masa Mesir dipimpin oleh Muhammad Mursi. Berawal dari pemerintahan Husni Mubarak yang jatuh saat adanya *Arab Spring* dan naiknya Muhammad Mursi secara demokratis hingga kudeta militer terhadap Mursi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan dalam 5 (lima) bab yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, tujuan penelitian, metode pengumpulan data, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II dijelaskan mengenai bagaimana pemerintahan Husni Mubarak sebelum rezim Mubarak ditumbangkan oleh Revolusi 25 Januari. Setelah

tumbangnya rezim Mubarak yang merupakan efek dari adanya Arab Spring di Timur Tengah terjadilah proses demokratisasi di Mesir dengan adanya pemilihan umum. Namun, setelah 1 (satu) tahun pemerintahannya terjadilah kudeta terhadap Mursi.

BAB III berisi pembahasan tentang faktor internal yang menyebabkan kudeta terhadap Mursi di Mesir. Kudeta yang terjadi merupakan akibat dari kegagalan Mursi dalam memimpin Mesir.

BAB IV berisi tentang analisa intervensi Amerika Serikat yang menyebabkan kegagalan demokratisasi Mesir. Pada bab ini penulis akan menuliskan bentuk intervensi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap kelompok oposisi Mursi dalam kudeta terhadap Mursi. Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis hingga menghasilkan sebuah hipotesa, maka pada bab ini penulis akan membuktikan hipotesa yang diperoleh pada penelitian ini.

Bagian paling akhir, BAB V berisi kesimpulan mengenai keseluruhan penelitian yang sudah disusun oleh penulis.